



Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah (depan kiri), bersama wali Kota Jogja, Hasto Wardoyo (depan, kanan) meninjau kawasan Kampung Lampion Code, Kotabaru, Jumat (29/5).

► KAWASAN KUMUH

Penataan Code Jadi Percontohan

CONDOKUSUMAN—Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia, Fahri Hamzah, meninjau kawasan Kampung Lampion Code, Kotabaru, Jumat (29/5). Dalam kunjungannya, Fahri menilai penataan kawasan bantaran Sungai Code yang dilakukan Pemkot Jogja dapat menjadi model penataan permukiman sungai di Indonesia.

"Saya diundang Pak Wali [Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo] untuk melihat beberapa lokasi penataan kawasan di sekitar sungai, khususnya Kali Code. Model seperti ini harus di-copy secara masif," ujarnya, Jumat.

Menurutnya, penataan kawasan sungai perlu dilakukan dengan konsep yang adaptif terhadap dinamika lingkungan, termasuk risiko banjir dan perubahan kondisi sungai. Ia juga menekankan pentingnya menghadirkan ruang publik di kawasan permukiman padat sebagai bagian dari penanganan kawasan kumuh. "Pinggir sungai harus dibikin

asri seperti perintah Presiden melalui *Gerakan Indonesia Asri*. Kawasan kumuh terlihat jelek karena *public space*-nya tidak ditata. Ke depan, kawasan kumuh harus berhasil melahirkan ruang publik," katanya.

Jalan Inspeksi
Saat ini, Pemkot Jogja terus mempercepat penataan kawasan kumuh di sepanjang bantaran Kali Code. Untuk menuntaskan pembangunan jalan inspeksi sepanjang empat kilometer dari wilayah perbatasan Kabupaten Sleman hingga Bantul, dibutuhkan anggaran Rp56 miliar.

Wali Kota Jogja, Hasto Wardoyo, mengatakan pembangunan jalan inspeksi di tepi sungai menjadi salah satu prioritas karena memiliki fungsi ganda, yakni mempercantik kawasan sungai sekaligus meningkatkan aksesibilitas dan keselamatan warga.

Keberadaan jalan ini akan memudahkan mobilitas warga serta menjadi akses darurat ketika terjadi

kebakaran atau saat ambulans perlu menjangkau permukiman di kawasan padat penduduk. "Setelah tersambung, jalan di tepi Kali Code bisa berfungsi sebagai jalan inspeksi sekaligus akses saat terjadi kedaruratan," ujarnya.

Hasto menjelaskan, biaya pembangunan jalan inspeksi dan penataan kawasan bantaran sungai diperkirakan mencapai Rp14 miliar per kilometer. Dengan sisa pekerjaan sepanjang empat kilometer, kebutuhan anggaran mencapai Rp56 miliar.

Penataan ini merupakan bagian dari konsep M3K (Mundur, Munggah, Madhep Kali) yang selama ini diterapkan Pemkot Jogja di tiga sungai utama, yakni Kali Code, Winongo, dan Gajah Wong.

Melalui konsep ini, rumah di bantaran sungai ditata agar lebih aman, sehat, dan menghadap ke arah sungai sehingga kawasan yang sebelumnya kumuh dapat berubah menjadi ruang hidup yang tertata. (Stefani Yulindriani)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005